

# **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*, DENGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

**Daniel Aditya Utama<sup>1</sup>, Riana Sitawati<sup>2</sup>, Subchan<sup>3</sup>**

STIE Dharmaputra  
Jl. Pamularsih Raya No. 16, Semarang

<sup>1</sup>[danieltjeng1991@gmail.com](mailto:danieltjeng1991@gmail.com)

<sup>2</sup>[rianasitawati@gmail.com](mailto:rianasitawati@gmail.com)

[dx.doi.org/10.21460/jrak.2022.182.423](https://doi.org/10.21460/jrak.2022.182.423)

## **ABSTRACT**

The purpose of this study is to know the effect of internal control on fraud prevention, with transparency and accountability as intervening variables. The population is all churches in Semarang City, which amounted to 312 churches. Sample was taken by lottery with proportional random sampling. 350 sets of questionnaires distributed in 175 churches, but only 112 sets from 111 churches could be processed. The data analysis technique used is Partial Least Square (PLS) with WarpPLS 7.0. The results of the study : (1) internal control has a positive effect on transparency; (2) internal control has a negative effect on accountability; (3) transparency has no effect on fraud prevention; (4) accountability has no effect on fraud prevention; (5) internal control has a positive effect on fraud prevention; (6) transparency is not able to mediate the effect of internal control on fraud prevention; (7) accountability is not able to mediate the effect of internal control on fraud prevention.

**Keywords :** *Internal Control, Fraud Prevention, Transparency, Accountability*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh gereja di Kota Semarang, yang berjumlah 312 gereja. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian dengan teknik *proportional random sampling*. Jumlah angket yang disebar sebanyak 350 set pada 175 gereja, namun hanya 112 set yang berasal dari 111 gereja yang dapat diolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan *WarpPLS 7.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi; (2) pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas; (3) transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*; (4) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*; (5) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*; (6) transparansi tidak mampu memediasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*; (7) akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

**Kata Kunci :** *Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud, Transparansi, Akuntabilitas*

## PENDAHULUAN

*Fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Maliawan, 2017). Pada kenyataannya, *fraud* hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun.

Istilah *fraud* belum terlalu dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia secara sempit lebih mengenal segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sekelompok orang, sebagai korupsi. Korupsi sebenarnya hanyalah salah satu bentuk dari praktik *fraud*, karena *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari pada korupsi.

Tidak hanya organisasi yang *profit-oriented* yang memiliki potensi terjadinya *fraud*, organisasi yang *non-profit* pun juga memiliki potensi terjadinya *fraud* (Jalil, 2018). Berdasarkan temuan Holfreter (2004) dalam Wibowo (2018), *fraud* pada organisasi *non-profit* di Amerika Serikat terdeteksi sebesar US\$ 600 miliar, dengan 85% data didominasi oleh organisasi keagamaan.

Gereja seharusnya menunjukkan perannya dalam menekan angka korupsi, karena korupsi tidak sesuai dengan Firman Tuhan yang merupakan landasan kehidupan gereja. Namun dalam kenyataannya, aktivitas dan perilaku kehidupan dalam gereja sering menunjukkan hal yang sebaliknya. Beberapa gereja di Indonesia justru terjebak dan turut terseret dalam kasus korupsi, dimana berikut ini merupakan ringkasan berita tentang kasus-kasus penyalahgunaan dana gereja, yang berhasil dirangkum oleh Wibowo (2017) :

Tabel 1. Ringkasan Kasus Penyalahgunaan Dana Gereja di Indonesia

No.	Sumber Berita	Ringkasan Kasus dan Kerugian
1.	www.timorraya.com/ diduga-korupsi-dana-gereja- 128-juta-dua-terdakwaini- disidangkan/ diakses: 12-1-2017, 9:42 WIB	Dugaan tindak korupsi dana bantuan sosial dari Kementerian Agama RI senilai Rp 1.000.000.000 untuk pembangunan gedung gereja St Maria Banneaux, Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT. Indikasi kerugian negara Rp 128.033.650. (pada tahun 2011)
2.	www.regional.kompas.com/ dugaan korupsi dana gereja Rp 4,7 Triliun Jemaat saling lapor diakses: 12-1-2017, 10:00 WIB	Dugaan korupsi dana gereja senilai Rp 4,7 Triliun digunakan untuk kepentingan pribadi pendeta, masih sulit dideteksi apakah terjadi kerugian negara atau tidak. (pada tahun 2013)
3.	www.nasional.republika. co.id/jemaat minta bekas bendahara gki yang gelapkan dana gereja dihukum diakses: 12-1- 2017, 10:29 WIB	Dugaan korupsi senilai Rp 2,3 Miliar dana gereja GKI Serpong, pemalsuan data dan penyalahgunaan wewenang oleh bendahara gereja. (pada tahun 2015)
4.	www.beritasatu.com/dugaan penyimpangan dana hibah gereja di Kabupaten Mappi dilaporkan ke kpk diakses: 12-1- 2017, 11:41 WIB	Dana hibah gereja dari PAGU Anggaran Rp 22 miliar hanya terserap Rp 6 miliar (hasil audit BPK, 2015). Indikasi kerugian negara Rp 16 miliar. Kasus sudah dilaporkan ke Polda Papua, tetapi tidak ada tindak lanjut akhirnya masyarakat Papua berinisiatif untuk melaporkan ke KPK. (catatan: hingga kini pembangunan gedung gereja juga belum selesai)

No.	Sumber Berita	Ringkasan Kasus dan Kerugian
5.	www.medan.tribunnews.com/ pendeta dan jemaat gereja methodist Indonesia demo ke mapolda diakses: 12-1-2017, 11:58 WIB	Dugaan korupsi dana dari Kemenpera oleh pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia senilai Rp 6,1 Miliar, hingga kini kasus masih menggantung.

Sumber : Wibowo (2017)

Gereja yang dikenal sebagai organisasi yang religius, ternyata juga tidak luput dari indikasi penyimpangan (*fraud*). Seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi gereja, seperti rohaniawan maupun bendahara mempunyai kemungkinan untuk melakukan penyimpangan karena kekuasaan (wewenang) yang dimilikinya (Wibowo, 2017).

Menurut Ruslan (2011) dalam Purwantini (2014), diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi terjadinya *fraud* dengan menggunakan pemikiran yang jelas. Hal pertama yang harus diidentifikasi adalah penyebab utama terjadinya *fraud*, sehingga bisa dirumuskan strategi yang tepat untuk menghilangkan, atau paling tidak dapat mengurangi intensitas yang ditimbulkan oleh *fraud* tersebut. *Fraud*, jika tidak dicegah dan dideteksi secara efektif akan dapat menimbulkan kerusakan serius bagi organisasi (Ghazali, 2014). Hal ini kemudian memunculkan pemikiran mengenai pentingnya upaya pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi.

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan pengendalian internal. Korupsi di lembaga gereja menunjukkan bahwa pengendalian internal belum dilakukan dengan cara yang efektif sejak awal, dan belum ada upaya mencegah *fraud* (tindakan menyimpang dan menyalahgunakan dana). Apabila pengendalian internal pada sebuah organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan sangat besar, begitu juga sebaliknya ketika pengendalian yang diterapkan kuat maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan dapat diperkecil, walaupun *fraud* dan kesalahan masih terjadi, tetapi hal tersebut dapat diketahui lebih cepat dan dapat segera diatasi (Arfah, 2011).

Penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan

*fraud*, terkhusus pada organisasi nirlaba seperti gereja menjadi penting dan menarik untuk dilakukan karena sebagian besar peneliti lebih tertarik pada pengendalian internal perusahaan ataupun organisasi bisnis yang berorientasi pada laba. Selain itu, minimnya riset mengenai efektivitas pengendalian internal yang dikhususkan untuk organisasi nirlaba seperti gereja, diakibatkan oleh ekspektasi terhadap organisasi gereja yang masih terlalu tinggi, bahkan orang-orang di dalam gereja dianggap religius, sehingga timbul anggapan bahwa tidak mungkin di dalam gereja terjadi kesalahan, kecurangan, ataupun penyimpangan. Padahal setiap organisasi, termasuk gereja membutuhkan pengendalian bukan saja karena telah terjadi penyimpangan, tetapi pengendalian internal justru sebagai upaya preventif atau pencegahan, dan bahkan sebagai upaya perlindungan terhadap seluruh sumber daya di dalamnya.

Penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* sudah banyak dilakukan, namun menunjukkan hasil yang berbeda. Hermiyetti (2010), Nisak (2013), Soleman (2013), Joseph (2015), Nurani (2016), Ariastini (2017), Maliawan (2017), Wulandari (2018), Zarlis (2018), dan Adeleke (2019) mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut berbeda dengan Usman (2015), Jalil (2018), Yuwono (2018), Adiko (2019), dan Sofia (2020) yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, saran peneliti untuk mengurangi adanya *research gap* antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* adalah dengan menambahkan variabel transparansi dan

akuntabilitas sebagai variabel *intervening*. Penerapan prinsip *good governance* bermanfaat untuk menekan terjadinya masalah keagenan. Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) akan memberikan kontribusi yang strategis, salah satunya adalah sangat efektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan mencegah terhadap korupsi dan suap (Soleman, 2013).

Semakin baik pengendalian internal di dalam gereja, maka pengelolaan keuangan gereja akan semakin transparan dan akuntabel, sehingga *fraud* akan semakin mudah untuk dicegah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, wajar, serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*, dengan studi empiris pada gereja-gereja se-Kota Semarang.

## KAJIAN LITERATUR

### Teori *Planned Behavior*

Teori ini menjelaskan kondisi dimana seseorang dapat berperilaku, didasarkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sebuah niat (*intention*) yang berubah menjadi perilaku (*behavior*). Oleh karena itu, seseorang dapat bertindak berdasarkan niat, hanya jika seseorang tersebut memiliki kontrol dan alasan untuk melakukan tindakan tersebut, yakni : alasan dari dalam diri (internal), dan alasan yang berasal dari luar diri seseorang tersebut (eksternal).

Teori *planned behavior* cenderung bersifat dinamis karena mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa berasal dari luar individu seseorang, atau faktor-faktor dimana individu mempertimbangkan kembali perilaku yang akan ia bentuk. Selain disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dan aturan yang ada, faktor individu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* (Amrullah, 2016). Sebelum seseorang melakukan sebuah tindakan *fraud*, tentu

akan ada niat (*intention*) yang mendorong sehingga terjadi sebuah perilaku (*behavior*).

### Teori Agensi

Jensen (1976) menjelaskan teori agensi sebagai suatu kontrak antara prinsipal (pemilik) dengan agen (manajer) sebagai wakil prinsipal, termasuk mendelegasikan hak untuk membuat keputusan kepada manajer. Teori agensi atau teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dengan para manajer dalam menjalankan perusahaan.

Manajemen (*agent*), dalam konteks teori keagenan ini juga mempunyai kecenderungan untuk merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya (*fraud*). Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen, atau yang sering disebut sebagai masalah keagenan.

### Teori *Fraud Triangle*

Cressey (1953) dalam Wibowo (2017) mengembangkan *fraud triangle theory* yang menjelaskan bahwa *fraud* disebabkan oleh adanya *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran).

Tekanan (*pressure*) adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Kesempatan (*opportunity*) adalah peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi, dan biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. Pembeneran (*rationalization*) menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, karena pelaku akan selalu mencari pembeneran atas tindakannya.

### Teori *GONE*

Teori *GONE* yang dikembangkan oleh G. Jack Bologna (Priantara, 2013) menyebutkan ada 4 (empat) faktor pendorong seseorang melakukan *fraud*, yakni : *Greed* berkaitan dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi, yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. *Opportunity* atau kesempatan berkaitan dengan sistem yang memberi lubang atau potensi terjadinya

korupsi, yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat, yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

*Need* atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan sarat kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku itu sendiri maupun orang lain, dan *deterrence effect* yang minim.

### **Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lain (Kumaat, 2010). Tuanakotta (2016) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang, dan dilaksanakan untuk tujuan utama untuk mencegah dan menghalangi (serta dengan membuat jera pelakunya) terjadinya *fraud*.

### **Pencegahan *Fraud***

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu : memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, serta mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Peluang melakukan *fraud* sangat terkait dengan keefektifan desain dan implementasi sistem pengendalian internal dan tata kelola (Priantara, 2013). Tugas utama dari pengendalian internal bukan mencari penyebab dari *fraud*, tetapi lebih kepada mendeteksi dan mencegah *fraud* meluas (Dimitrijevic, 2015). Semakin tidak efektifnya sistem pengendalian internal dan tata kelola, maka peluang atau risiko terjadinya *fraud* akan semakin terbuka.

### **Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari kemungkinan kurang terbukanya perusahaan terhadap para *stakeholder*, sehingga dapat mencegah kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat terjadinya penyalahgunaan informasi-informasi penting dan rahasia perusahaan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau institusi.

### **Akuntabilitas**

Muhammad (2007) dalam Sutedjo (2009), berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya yang ada, pada akhirnya akan mengarahkan organisasi sebagai pemegang amanah publik, untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi**

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan operasional untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya organisasi. Pengendalian internal berpengaruh terhadap mekanisme *good governance* (Widjaja, 2014). Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip transparansi (Sari, 2017).

Pengawasan (pengendalian internal) memiliki keterkaitan yang erat dengan transparansi informasi (Wibowo, 2017).

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Penerapan pengendalian internal yang baik akan memberikan keyakinan terhadap kualitas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*. Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka transparansi keuangan dalam organisasi tersebut juga akan semakin meningkat, karena mekanisme pengawasan dalam pengendalian internal berguna untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Rakhman (2012), Amelia (2015), Sari (2017), Yuliani (2017), dan Sari (2020), yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap transparansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi.

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas**

Pengendalian internal memberikan kontribusi terhadap penerapan *good governance* (Wiratno, 2011). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang menjamin adanya pertanggungjawaban secara terbuka atas penyelenggaraan organisasi, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi (*stakeholder*), sebagai bukti yang menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai telah sesuai dengan tujuan organisasi.

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas (Sari, 2017). Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka akuntabilitas keuangan dalam organisasi tersebut juga akan semakin meningkat. Pengendalian internal akan membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik (Tjungadi, 2020). Hal ini dibuktikan oleh penelitian Primayani (2014), Purwantini

(2014), Sari (2017), Hermanto (2019), dan Sari (2020), yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan *Fraud***

Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam organisasi, untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya publik dan pengambilan setiap kebijakan organisasi, serta mampu mengakses secara mudah setiap informasi yang material dan relevan. Penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari kemungkinan kurang terbukanya organisasi terhadap para *stakeholder*, sehingga dapat mencegah kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat terjadinya penyalahgunaan informasi-informasi penting dan rahasia yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau institusi.

Prinsip transparansi mengharuskan informasi tersedia dan dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut, sehingga praktik kecurangan (*fraud*) dapat dicegah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013), Beawiharta (2014), Jannah (2016), Larasati (2019), Rowa (2019), yang menyimpulkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud***

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen (*agent*) atau pihak yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola sumber daya kepada publik (*principal*) atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas berhubungan

dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (Krina, 2003).

Penerapan prinsip akuntabilitas berguna untuk menciptakan kinerja perusahaan atau organisasi, secara efektif dan efisien. Semakin baik mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) suatu organisasi, maka praktik kecurangan (*fraud*) akan semakin mudah dicegah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013), Beawiharta (2014), Jannah (2016), Larasati (2019), Saputra (2019), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud***

Pengendalian internal dapat menjadi penuntun dan pengawas jalannya sistem kerja organisasi yang sudah tersusun. Pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen organisasi, karena hal tersebut dapat membantu menjaga aset yang dimiliki oleh organisasi, pengelolaan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, dan penyimpangan.

Tunggal (2010) dalam Widjaja (2014) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan membangun struktur pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, yakni dengan menciptakan kondisi internal yang baik agar dapat mencegah timbulnya *fraud*.

Jika pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian

internal dalam suatu perusahaan atau organisasi sudah baik, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat dicegah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti (2010), Nisak (2013), Soleman (2013), Joseph (2015), Nurani (2016), Ariastini (2017), Maliawan (2017), Wulandari (2018), Zarlis (2018), dan Adeleke (2019), yang sama-sama menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*, dengan Transparansi sebagai Variabel *Intervening***

Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kegiatan yang ada di organisasi dan meminimalkan hambatan yang akan dihadapi organisasi. Pengendalian internal sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasional suatu organisasi atau institusi, serta membantu organisasi atau institusi tersebut dalam mencapai tujuannya.

*Good governance* dapat tercipta dengan adanya pengendalian internal yang efektif dalam suatu organisasi (Wiratno, 2011). Ketika pengendalian internal dalam organisasi berjalan dengan baik, maka praktik *good governance* yang baik dan benar dapat secara otomatis ditingkatkan (Soleman, 2013).

Kunci terselenggaranya tata laksana pemerintahan maupun perusahaan yang baik (*good governance*) salah satunya adalah adanya transparansi (Sulistiyani, 2004 dalam Putra, 2017). Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan, sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif (Sangki, 2017). Di samping itu, penerapan prinsip transparansi juga akan lebih memudahkan pengawasan atas tindakan-tindakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi atau institusi.

Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan oleh

manajemen dalam organisasi akan mudah untuk dicegah, karena informasi yang mudah diakses dan dipahami tersebut akan memberikan peluang bagi *stakeholder* untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan organisasi, termasuk dalam hal pengelolaan dana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>6</sub> : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, dengan transparansi sebagai variabel *intervening*.

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*, dengan Akuntabilitas sebagai Variabel *Intervening***

Pengendalian internal merupakan upaya perusahaan dalam melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan sudah akurat, serta meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi jika pengendalian internal dalam suatu organisasi belum dilaksanakan secara efektif. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan akan sangat besar (Agoes, 2016).

Kunci terselenggaranya tata laksana pemerintahan maupun perusahaan yang baik (*good governance*) salah satunya adalah adanya akuntabilitas (Sulistiyani, 2004 dalam Putra, 2017). Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban korporasi, yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif, serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku (Kumaat, 2010).

Pengendalian internal membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik (Tjungadi, 2020). Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka pengelolaan keuangan akan semakin akuntabel, sehingga *fraud* akan semakin mudah untuk dicegah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>7</sub> : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, dengan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*.

## **METODA PENELITIAN**

### **Sumber Data, Populasi, dan Sampel**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui angket (kuesioner). Angket akan disebar sebanyak 2 set masing-masing pada gereja yang dijadikan sebagai sampel.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh gereja, baik gereja Kristen maupun gereja Katolik se-Kota Semarang. Jumlah gereja, baik gereja Kristen maupun gereja Katolik se-Kota Semarang yakni sebanyak 312 gereja. Dengan taraf kesalahan 5%, didapatkan sampel sebanyak 175 gereja, dimana penetapan ukuran sampel sebanyak 175 gereja tersebut akan diambil secara acak (*random*) dengan cara undian, namun dilakukan secara proporsional pada masing-masing gereja Kristen maupun Katolik yang ada di Kota Semarang.

### **Teknik Analisis Data**

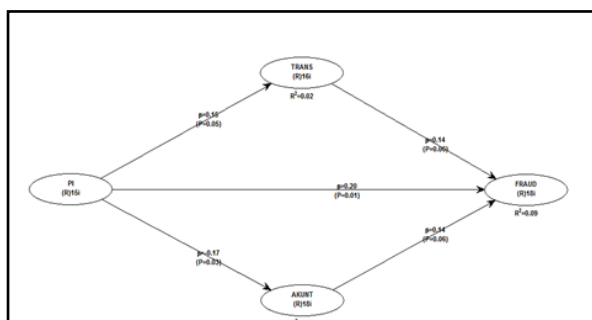
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS), dengan bantuan program *WarpPLS 7.0*, antara lain : analisis statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran atau *outer model* (validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas), serta evaluasi model struktural atau *inner model* (*Goodness of Fit*, uji R, analisis *partial F-test*, analisis relevansi prediktif, dan analisis jalur).

## **HASIL**

### **Analisis Jalur**

Besarnya pengaruh masing-masing variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen (endogen), dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut :





Gambar 1.  
Model Diagram Jalur

**Pengaruh Langsung**

- 1) Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05, dengan nilai  $\beta = 0,15$ , sehingga  $H_1$  diterima.

- 2) Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,03 ( $< 0,05$ ), dengan nilai  $\beta = -0,17$ , sehingga  $H_2$  ditolak.
- 3) Pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,06 ( $> 0,05$ ), dengan nilai  $\beta = 0,14$ , sehingga  $H_3$  ditolak.
- 4) Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,06 ( $> 0,05$ ), dengan nilai  $\beta = 0,14$ , sehingga  $H_4$  ditolak.
- 5) Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,01 ( $< 0,05$ ), dengan nilai  $\beta = 0,20$ , sehingga  $H_5$  diterima. Karena pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, maka pengujian efek mediasi dapat dilanjutkan (Ghozali, 2020).

**Pengaruh Tidak Langsung**

- 1) Nilai signifikansi transparansi sebagai efek mediasi pada kolom *P values of indirect effects for paths with 2 segments* sebesar 0,351 ( $> 0,05$ ), sehingga  $H_6$  ditolak.
- 2) Nilai signifikansi akuntabilitas sebagai efek mediasi pada kolom *P values of indirect effects for paths with 2 segments* sebesar 0,357 ( $> 0,05$ ), sehingga  $H_7$  ditolak.

**PEMBAHASAN**

- 1)  $H_1$  diterima dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang ada di dalam suatu gereja, maka transparansi keuangan di dalam gereja tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini telah mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rakhman (2012), Amelia (2015), Sari (2017), Yuliani (2017), dan Sari (2020).
- 2)  $H_2$  ditolak, karena memiliki arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal di dalam suatu gereja, maka semakin rendah akuntabilitas di dalam gereja tersebut, dan semakin rendah pengendalian internal di dalam suatu gereja, maka semakin baik akuntabilitas di dalam gereja tersebut. Padahal dalam praktek pelaksanaannya, semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka akuntabilitas keuangan dalam organisasi tersebut seharusnya juga akan semakin meningkat. Hal ini mungkin disebabkan karena pemimpin gereja, dengan majelis gereja yang dipilih secara demokratis, telah mempersepsikan sistem pemerintahan gerejawi yang ideal dan akuntabel, sehingga tidak memerlukan pengendalian internal (Wibowo, 2017). Hal ini kemungkinan juga didukung oleh pemikiran mayoritas anggota jemaat gereja yang masih berada pada pola

keyakinan sakral, tidak skeptis atas laporan keuangan, rasa sungkan dan takut pada pemimpin gereja yang dianggap sebagai wakil Tuhan, serta percaya bahwa uang persembahan dari jemaat pasti tidak akan disalahgunakan (*blind trust*). Kepercayaan yang diberikan oleh para jemaat inilah, yang dapat mengakibatkan mekanisme pengendalian internal (pengawasan) kurang efektif dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) para pengurus gereja. Semakin baik mekanisme pengawasan yang telah dilakukan, pertanggungjawaban keuangan gereja akan semakin berkurang, karena pemimpin dan pengurus gereja merasa selalu diawasi dan tidak leluasa dalam mengelola keuangan gereja. Semakin rendah kekuatan pengendalian internal (pengawasan) di dalam gereja, pemimpin dan pengurus gereja akan semakin efektif dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas (pertanggungjawaban), karena merasa bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan gereja kepada para jemaat merupakan suatu kewajiban, kebiasaan umum, dan sudah ada dalam aturan tata gereja (*belief*), sehingga tidak perlu diwujudkan dengan “paksaan” dan aturan. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden pada angket terbuka (pertanyaan tambahan), dimana 42% responden menyatakan bahwa akuntabilitas di dalam gereja sudah cukup baik, karena selama ini sudah menjadi kebiasaan bahwa laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran selalu disampaikan secara periodik dan rutin kepada para jemaat, baik melalui warta jemaat maupun papan pengumuman di sekretariat gereja. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Primayani (2014), Purwantini (2014), Sari (2017), Hermanto (2019), dan Sari (2020), yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

- 3) H<sub>3</sub> ditolak dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi di dalam suatu gereja, tidak berkontribusi dan berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud* di dalam gereja tersebut. Padahal dalam praktek pelaksanaannya, semakin baik transparansi suatu organisasi, maka pencegahan *fraud* seharusnya juga akan semakin meningkat.

Hal ini mungkin disebabkan karena prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya merupakan prinsip yang saling terkait dan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kunci terselenggaranya tata laksana pemerintahan maupun perusahaan yang baik (*good governance*) adalah adanya transparansi dan akuntabilitas (Sulistiyani, 2004 dalam Putra, 2017). Walaupun kedua prinsip ini adalah prinsip yang berbeda dan sejajar, pada pelaksanaannya transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang saling berkaitan, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi (CUI-ITB, 2004).

Ketersediaan dan kemudahan akses suatu informasi tidak akan bernilai apa-apa, tanpa adanya suatu bentuk informasi dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan gereja, yang berguna untuk memonitor, menilai, dan mengkritisi proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban keuangan gereja selama ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip *good governance* yang sulit dipisahkan. Sesuatu tidak dapat dikatakan akuntabel kalau tidak transparan, walaupun tidak dapat dijamin juga sesuatu yang transparan pasti akuntabel.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soleman (2013), Beawiharta (2014), Jannah (2016), Larasati (2019), Rowa

- (2019), yang menyimpulkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
- 4) H<sub>4</sub> ditolak dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas di dalam suatu gereja, tidak berkontribusi dan berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud* di dalam gereja tersebut. Padahal dalam praktek pelaksanaannya, semakin baik akuntabilitas suatu organisasi, maka pencegahan *fraud* seharusnya juga akan semakin meningkat. Hal ini mungkin disebabkan karena prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya merupakan prinsip yang saling terkait dan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kunci terselenggaranya tata laksana pemerintahan maupun perusahaan yang baik (*good governance*) adalah adanya transparansi dan akuntabilitas (Sulistiyani, 2004 dalam Putra, 2017). Walaupun kedua prinsip ini adalah prinsip yang berbeda dan sejajar, pada pelaksanaannya transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang saling berkaitan, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi (CUI-ITB, 2004). Tanpa jaminan akses informasi yang akurat dan memadai, pertanggungjawaban (akuntabilitas) gereja hanya menjadi pertanggungjawaban semu belaka. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban gereja tidak dilandasi oleh keterbukaan dan kemudahan akses informasi keuangan yang akurat dan jelas bagi para jemaat dan *stakeholder*, sehingga rawan terjadinya penyimpangan akibat kurang terbukanya gereja terhadap para jemaat dan *stakeholder*. Dengan demikian, pertanggungjawaban keuangan gereja tidak akan dapat diketahui oleh para jemaat dan *stakeholder*, jika gereja tidak terbuka dalam menyampaikan informasi-informasi yang akurat dan jelas, sehubungan dengan sumber penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan anggaran keuangan gereja. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soleman (2013), Beawiharta (2014), Jannah (2016), Larasati (2019), Saputra (2019), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
- 5) H<sub>5</sub> diterima dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang ada di dalam suatu gereja, maka aktivitas pencegahan *fraud* di dalam gereja tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini telah mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hermiyetti (2010), Nisak (2013), Soleman (2013), Joseph (2015), Nurani (2016), Ariastini (2017), Maliawan (2017), Wulandari (2018), Zarlis (2018), dan Adeleke (2019), yang sama-sama menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
- 6) H<sub>6</sub> ditolak dengan *Variance Accounted For* (VAF) sebesar 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan dari keefektifan desain dan implementasi sistem pengendalian internal, tidak mampu meningkatkan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya merupakan prinsip yang saling terkait dan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, transparansi tanpa akuntabilitas tidak akan menjamin terciptanya laporan keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transparansi (keterbukaan) yang dihasilkan dari keefektifan desain dan implementasi sistem pengendalian internal tersebut, tidak mampu meningkatkan pengaruh pengendalian internal terhadap

pengecahan *fraud* tanpa adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban), yang secara bersama-sama akan dapat menciptakan mekanisme pengawasan (*control*) terhadap pengelolaan keuangan gereja.

- 7)  $H_7$  ditolak dengan *Variance Accounted For* (VAF) sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa, akuntabilitas yang dihasilkan dari keefektifan desain dan implementasi sistem pengendalian internal, tidak mampu meningkatkan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Tanpa jaminan akses informasi yang akurat dan memadai (transparansi), akuntabilitas (pertanggungjawaban) gereja hanya menjadi pertanggungjawaban semu belaka. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban gereja tidak dilandasi oleh keterbukaan dan kemudahan akses informasi keuangan yang akurat dan jelas bagi para jemaat dan *stakeholder*, sehingga rawan terjadinya penyimpangan akibat kurang terbukanya gereja terhadap para jemaat dan *stakeholder*. Dengan demikian, akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang dihasilkan dari keefektifan desain dan implementasi sistem pengendalian internal tersebut, tidak mampu meningkatkan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* tanpa adanya transparansi (keterbukaan), yang secara bersama-sama akan dapat menciptakan mekanisme pengawasan (*control*) terhadap pengelolaan keuangan gereja.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

### Simpulan

- 1) Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi gereja-gereja se-Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai  $\beta = 0,15$ . Dengan demikian hipotesis 1 ( $H_1$ ) dalam penelitian ini diterima.
- 2) Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas gereja-gereja se-Kota Semarang. Hal ini dapat

dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,03 ( $< 0,05$ ) dengan nilai  $\beta = -0,17$ . Dengan demikian hipotesis 2 ( $H_2$ ) dalam penelitian ini ditolak.

- 3) Transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada gereja-gereja se-Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,06 ( $> 0,05$ ) dengan nilai  $\beta = 0,14$ . Dengan demikian hipotesis 3 ( $H_3$ ) dalam penelitian ini ditolak.
- 4) Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada gereja-gereja se-Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,06 ( $> 0,05$ ) dengan nilai  $\beta = 0,14$ . Dengan demikian hipotesis 4 ( $H_4$ ) dalam penelitian ini ditolak.
- 5) Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada gereja-gereja se-Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,01 ( $< 0,05$ ) dengan nilai  $\beta = 0,20$ . Dengan demikian hipotesis 5 ( $H_5$ ) dalam penelitian ini diterima.
- 6) Transparansi tidak mampu memediasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada gereja-gereja se-Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,351 ( $> 0,05$ ), dan nilai *Variance Accounted For* (VAF) sebesar 9,5%. Dengan demikian hipotesis 6 ( $H_6$ ) dalam penelitian ini ditolak.
- 7) Akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada gereja-gereja se-Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,357 ( $> 0,05$ ), dan nilai *Variance Accounted For* (VAF) sebesar 0%. Dengan demikian hipotesis 7 ( $H_7$ ) dalam penelitian ini ditolak.

### Keterbatasan

- 1) Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada gereja-gereja se-Kota Semarang.
- 2) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 111 gereja dari target awal 175 gereja. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas beberapa gereja di Kota Semarang yang masih

*off* dan tidak menerima kunjungan orang luar, akibat pandemi *COVID-19* yang masih cukup tinggi.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang peneliti hadapi selama melakukan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain :

- 1) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih luas, agar hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasikan untuk seluruh gereja yang ada.
- 2) Berkaitan dengan kondisi pandemi *COVID-19* yang masih terjadi, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan penggunaan *social media* yang ada sebagai alat untuk pengumpulan data.
- 3) Variabel pengendalian internal hanya dapat mempengaruhi variabel pencegahan *fraud* sebesar 6,6% (berpengaruh sangat kecil), dan sisanya sebesar 93,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*, misalnya : peran auditor internal, integritas individu, faktor religiusitas, dll. Selain itu, penggunaan organisasi nirlaba, selain gereja sebagai subjek dalam penelitian yang mengkaji masalah pencegahan *fraud*, mungkin dapat dipertimbangkan kembali.

**DAFTAR REFERENSI**

- Adeleke, Olulade Kehinde *et al.* 2019. "Impact of Internal Control on Fraud Prevention in Deposit Money Banks in Nigeria". *Nigerian Studies in Economics and Management Sciences*. Vol. 2 (1) pp. 42-51.
- Adiko, Ridho Gilang dkk. 2019. "Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum". *JAKK*. Vol. 2 (1) hal. 52-68.
- Agoes, Sukrisno. 2016. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik (Edisi 4 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amelia, Rossa. 2015. "Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)". *Jom FEKON*. Vol. 2 (2) hal. 1-15.
- Amrullah, Muhammad Mukhlis dan Nurlita Novianti. 2016. "Implementasi *Theory of Planned Behavior* dalam Mendeteksi Minat dan Perilaku *Fraud* pada Sektor Publik (Studi pada Bagian Keuangan di SKPD se-Kota Probolinggo)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 5 (2) hal. 1-20.
- Arfah, Eka Ariaty. 2011. "Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung)". *Jurnal Investasi*. Vol. 7 (2) hal. 137-153.
- Ariastini, Ni Kadek Dwi dkk. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Proactive Fraud Audit*, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengelolaan Dana BOS se-Kabupaten Klungkung". *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8 (2).
- Beawiharta, Innosanto dan Sri Rahayu. 2014. "Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014". *e-Proceeding of Management*. Vol. 1 (3) hal. 226-237.
- CUI-ITB. 2004. "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian *Good Governance*". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 15 (1) hal. 34-47.
- Dimitrijevic, Dragomir, Vesna Milovanovic, Vladimir Stancic. 2015. "The Role of A Company's Internal Control System In Fraud Prevention". *Financial Internet Quarterly,,e-Finanse*. Vol. 11 (2) pp. 34-44.
- Ghazali, Mohamad Zulkurnai *et al.* 2014. "A Preliminary Study on Fraud Prevention and Detection at The State and Local Government Entities in Malaysia". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. pp. 437-444.
- Ghozali, Imam. 2020. *Partial Least Squares Konsep Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 7.0*. Semarang: BP UNDIP.
- Hermanto, Soni. 2019. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Survei pada Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)". *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol. 20 (2).
- Hermiyetti. 2010. "Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 14 (2).
- Jalil, Fitri Yani. 2018. "Internal Control, Anti-Fraud Awareness, and Prevention of Fraud". *Etikonomi*. Vol. 17 (2) hal. 297-306.
- Jannah, Sitti Fitratul. 2016. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya)". *Jurnal AKRUAL*. Vol. 7 (2) hal. 177-191.
- Jensen, Michael C and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol. 3 (4), pp. 305-360.
- Joseph, Oguda Ndege *et al.* 2015. "Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of

- Kakamega County”. *International Journal of Business and Management Invention*. Vol. 4 (1) pp. 47-57.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumaat, Valery G. 2010. *Internal Audit*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Larasati, Yarry Septia dan Surtikanti. 2019. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan). *JAFTA*. Vol. 1 (1) hal. 31-43.
- Maliawan, Ida Bagus Dwika dkk. 2017. “Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar)”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8 (2).
- Nisak, Chairun dkk. 2013. “Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan”. *JAFFA*. Vol. 1 (1) hal. 15-22.
- Nurani, Fitroh dan Evi Octavia. 2016. “Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada Telkom Foundation”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 8 (1) hal. 19-29.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Primayani, Putu Riana dkk. 2014. “Pengaruh Pengendalian Internal, *Value for Money*, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung)”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 (1).
- Purwantini, Anissa Hakim dan Siti Noor Khikmah. 2014. “Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* melalui Akuntabilitas Publik sebagai Variabel *Intervening*”. *Jurnal Optimum*. Vol. 4 (1) hal. 53-65.
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Fraud Auditing*. Jakarta: BPKP.
- Putra, I Putu Andi Suar Jaya dkk. 2017. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8 (2).
- Rakhman, Muhammad Arief. 2012. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat. *Skripsi*. FPEB Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Rowa, Cecilia Wirna F dan I Komang Arthana. 2019. “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang”. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*. Vol. 7 (2) hal. 122-137.
- Sangki, Adianto Asdi dkk. 2017. “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)”. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1 (1).
- Saputra, Komang Adi Kurniawan dkk. (2019). “Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal KRISNA*. Vol. 10 (2) hal. 168-176.
- Sari, Embun Widya. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu”. *JOM Fekon*. Vol. 4 (1) hal. 571-586.
- Sari, Ratna Purnama dkk. 2020. “Pentingnya Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. *JRAMB*. Vol. 6 (1) hal. 1-10.
- Sofia, Irma Paramita. 2020. “*The Impact of Internal Control and Good Corporate*

- Governance on Fraud Prevention (Call for Paper – 2<sup>nd</sup> International Seminar on Accounting Society)*". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. Vol. 2 (1) hal. 251-257.
- Soleman, Rusman. 2013. "Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 17 (1) hal. 57-74.
- Sutedjo. 2009. Persepsi *Stakeholders* terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal. *Tesis*. Program Pascasarjana UNDIP. Semarang.
- Tjungadi, Marselinus Aditya Hartanto dan Yan Rahadian. 2020. "Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC". *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. Vol. 12 (2) hal. 241-264.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2016. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Bhima Azis dkk. 2015. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 23 (4) hal. 18-34.
- Wibowo, Eka Adhi dan Heru Kristanto. 2017. "Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal". *Jurnal Integritas*. Vol. 3 (2) hal. 105-136.
2018. "Persepsi Anggota Gereja atas Pengendalian Internal". *Jurnal Gema Teologika*. Vol. 3 (1) hal. 53-70.
- Widjaja, Ferlencia dan Ronny H. Mustamu. 2014. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Industri Keramik". *Jurnal AGORA*. Vol. 2 (1).
- Wiratno, Adi dkk. 2011. "Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan *Good Governance*, serta Implikasinya pada Kinerja (Survey pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal)". *JP FEB UNSOED*. Vol. 1 (1) hal. 1-8.
- Wulandari, Dewi Novita dan Muhammad Nuryatno. 2018. "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran *Anti-Fraud*, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan". *JRAMB*. Vol. 4 (2) hal. 117-125.
- Yuliani, Nur Laila. 2017. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 24 (1) hal. 1-14.
- Yuwono, Yutdi. 2018. Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, dan *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kab. Magelang). *Skripsi*. FEB Universitas Muhammadiyah. Magelang.
- Zarlis, Dwi. 2018. "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* di Rumah Sakit (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta di Jabodetabek)". *Jurnal Transparansi*. Vol. 1 (2) hal. 206-217.

## Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).